

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT

- NAMA ORGANISASI** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT
- TUGAS** : Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI** : a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan.
 b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum.
 c. Pelaksanaan fasilitas perencanaan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
 d. Pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
 e. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat
 f. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan
 g. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat	Indeks Kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat	71	Kepala Divisi Administrasi
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat	70	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat	90	

	Barat		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat	90%	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Mantan Narapidana /Anak yang Berhasil di Nusa Tenggara Barat	30%	
Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	Menurunnya Persentase Residivis di Nusa Tenggara Barat	10%	
Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasyarakatan; dan Pengelolaan Basan Baran	Persentas Basan Baran yang Dikelola Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat	90%	
	Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat	90%	
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat	90%	
	Persentase Anak yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat	90%	
	Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat	90%	
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelayanan Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat	90%	
	Persentase Tahanan	10%	

	yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat		
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat	90%	
	Persentase Anak yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Sesuai Dengan Standar di Nusa Tenggara Barat	90%	
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	38.400.200 Layanan	Kepala Divisi Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7,3	
Meningkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	13.409 LHK	
Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan Peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80 %	
	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang mendapat pembinaan substansi perancangan Peraturan daerah	1052 orang	
Terwujudnya Penyebaran Informasi dan Pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah NTB yang efektif	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah NTB	3.0	
	Persentase layanan Program AHU di kantor Wilayah NTB yang diselesaikan	80 %	
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah NTB yang berkualitas baik sekali	Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah NTB	100 %	

			Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase Penyelesaian Permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	99 %	
	Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	99 %	
	Jumlah indikasi Geografis yang diawasi	33	
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	1 Pemerintah Daerah	
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Pemerintah Daerah	
Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	1 layanan	
Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah, analisis dan evaluasi hukum di daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan litigasi	145 orang	
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin	18 kegiatan	
	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 daerah	
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 daerah	
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 daerah	
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 daerah	
	Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (tematik)	50 peserta	
	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah	20%

wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia		
Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	10 buku	



Kepala Kantor Wilayah,

Drs. Andi Dahrif Rafied, M.Si
NIP. 19600912 198003 1 001